

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemenuhan *Personal Human Security* bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan berfokus pada perlindungan hukum dan implementasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pemenuhan *Personal Human Security*, perlindungan hukum, dan peran pemerintah dalam perlindungan perempuan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan non-doktrinal empiris dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan PMI masih menghadapi berbagai kendala. Perempuan Pekerja Migran Indonesia masih mengalami pelanggaran hak *Personal Human Security* berupa *underpayment*, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, eksploitasi, dan lain-lain. Selain itu, budaya patriarki memperparah praktik ketidakadilan berbasis gender pada perempuan PMI dan menghambat mereka dalam mendapatkan perlindungan yang memadai. Regulasi perlindungan PMI yang hadir pun belum sepenuhnya mengakomodasi konvensi internasional dan belum responsif gender. Peran pemerintah melalui Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Orang juga masih bersifat egosektoral, belum menjadikan PTPPO sebagai prioritas, dan belum berperspektif gender. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi bagi PMI, pengawasan yang lebih ketat terhadap perekrutan, serta penguatan pemerintah dalam menangani kekerasan dan perdagangan orang. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan upaya kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan menjamin pemenuhan *Personal Human Security* perempuan Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: *Personal Human Security, Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Hukum, TPPO, Efektivitas Hukum*

This study examines the fulfillment of Personal Human Security for female Indonesian Migrant Workers (PMI), focusing on legal protection and the implementation of government policies. The research aims to analyze the fulfillment of Personal Human Security, legal protection, and the government's role in safeguarding female Indonesian Migrant Workers. It employs a non-doctrinal empirical approach with descriptive-analytical methods. The results indicate that protection for female PMIs still faces numerous challenges. Female Indonesian Migrant Workers experience violations of Personal Human Security rights, such as underpayment, physical violence, verbal abuse, psychological violence, exploitation, and more. Furthermore, patriarchal culture exacerbates gender-based injustices against female PMIs and hinders their access to adequate protection. The existing regulations for PMI protection are still insufficiently aligned with international conventions and lack gender responsiveness. The government's role, through the Task Force for the Eradication of Human Trafficking, remains egosectoral, does not prioritize anti-human trafficking efforts, and lacks a gender perspective. The study recommends enhancing education for PMIs, stricter monitoring of recruitment processes, and strengthening governmental efforts to address violence and human trafficking. These efforts can be supported by collective actions involving the government, communities, and international organizations to improve the effectiveness of legal protection and ensure the fulfillment of Personal Human Security for female Indonesian Migrant Workers.

Keywords: *Personal Human Security, Indonesian Female Migrant Workers, Legal Protection, Human Trafficking, Effectiveness of Law*